

Bulan :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	1	9
---	---	---	---



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	Kompas	Sindo	Tempo
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		Indopos	Pos Kota	Warta Kota

## Penerimaan Pajak Tak Optimal

### KUA-PPAS Disahkan Rp87,95 Triliun

JAKARTA - DKI Jakarta dinilai kurang berani menargetkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020 Rp100 triliun. Hal itu lantaran optimalisasi penerimaan pajak di ibu kota sangat rendah.

Alhasil, kebijakan umum anggaran-plafon prioritas anggaran sementara (KUA-PPAS) 2020 disahkan Rp87.956.148.476.363.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA) Uchok Sky Khadafi mengatakan, optimalisasi penerimaan pajak di DKI masih rendah.

Setidaknya dapat dilihat dari upaya mengejar pajak kendaraan mewah yang hingga kini masih kedodoran.

Maka, peningkatan target pajak untuk menyeimbangkan belanja dan pendapatan APBD DKI 2020 yang telah disepakati sebesar Rp87,95 triliun menjadi tantangan tersendiri.

"Seharusnya DKI berani untuk menetapkan APBD 2020 sebesar Rp100 triliun. Rp87,95 triliun itu kecil. Kalau mereka sejak awal mampu mengelola sektor pajak saya rasa tidak ada isu defisit APBD," ujar dia kepada INDOPOS saat dihubungi, Rabu (27/11/2019).

Uchok menyebut, selama pengawasan pajak masih lemah maka opti-

malisasi penerimaan dari sektor pajak rawan penyalahgunaan. Terlebih, data pajak tergolong rahasia negara yang tidak mudah untuk diakses termasuk oleh anggota DPRD DKI.

"Kalau tidak ada keterbukaan, penerimaan pajak tidak akan optimal bahkan terbuka potensi 'mark down'. Jadi efektif atau tidaknya penerimaan pajak sangat bergantung dari pengawasan di DKI," ungkap dia.

Dia meyakini, dengan memanfaatkan sektor pajak saja, DKI bisa membiayai seluruh pembangunan bahkan menutup biaya belanja. Selama ini dia tidak melihat hal itu lantaran sektor pajak tertutup.

Dia mencontohkan, pengejaran pajak kendaraan mewah sebagai contoh buruknya pengelolaan pajak di DKI. "Padahal cukup dari penerimaan hotel saja nilai pajak DKI pasti besar. Sekarang DKI apakah memiliki data jumlah hotel di ibu kota. Dana perimbangan pusat itu kecil. Cukup memanfaatkan gedung dan hotel saya rasa DKI bisa menutupi semuanya," tutur Uchok.

Seperti diketahui, DPRD DKI Jakarta menggelar Rapat Badan Anggaran pada Selasa (26/11). Dalam rapat tersebut DPRD DKI secara resmi menyepakati kebijakan umum anggaran plafon prioritas anggaran sementara DKI Jakarta 2020 sebesar Rp87.956.148.476.363.

"Pembahasan KUA-PPAS sebesar Rp 87,956,148,476,363 disahkan," ujar Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di DPRD DKI, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (26/11/2019).

Kendati telah disepakati oleh DPRD DKI Jakarta, namun Pajak Anggaran Daerah (PAD) DKI harus mengalami peningkatan sebesar Rp57.561.162.309.490. Jumlah tersebut naik drastis dari naik tahun sebelumnya yang mencapai Rp44 triliun.

Adapun alokasi anggaran yang dinaikkan berasal dari pajak parkir yang awalnya sekira Rp1,1 triliun menjadi Rp1,35 triliun.

Kemudian, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula Rp1,350 triliun menjadi Rp1,4 triliun serta Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dari Rp5,8 triliun menjadi Rp5,9 triliun.

"Semua dinaikkan dengan tujuan depan memberikan semangat kepada Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) untuk bisa mendongkrak kembali pendapatan kita," kata dia.

Sementara itu, Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah DKI Jakarta Faisal Syafruddin menerima dengan lapang dada terkait kenaikan PAD di 2020.

Namun, Faisal pun meminta dukungan dari anggota DPRD DKI Jakarta untuk memberikan dukungan dalam upaya meningkatkan PAD tahun 2020. (aen)